



Senin, 18 Januari 2021

1. [Foto] Pendapatan Premi Allianz Tetap Tumbuh
Bisnis Indonesia / 16-01-2021 hal : 3

■ PENDAPATAN PREMI ALLIANZ TETAP TUMBUH



Bisnis/Dedi Gunawan

Pekerja melakukan perawatan logo Allianz di Jakarta, Jumat (15/1). PT Asuransi Allianz Life Indonesia optimistis bahwa adaptasi terhadap kondisi pandemi Covid-19 merupakan kunci perusahaan asuransi untuk

terus bertumbuh. Pendapatan premi bruto Allianz Life pada kuartal III/2020 mencapai Rp11,7 triliun, tumbuh 27% (year-on-year) dibandingkan dengan periode yang sama 2019.

Juni 2020, Aset Bumiputera Rp 10,1 Triliun

Oleh Prisma Ardianto

► JAKARTA – Aset Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 per Juni 2020 tercatat sebesar Rp 10,1 triliun, terus merosot sejak tahun 2016. Di samping itu, jumlah peserta tertanggung juga cenderung menurun sejak 2017.

Data tersebut dipaparkan dalam Pokok-pokok Keterangan Presiden pada Salinan Putusan Hakim MK Nomor 32/PUU-XVI-11/2020. Putusan itu mengabulkan sebagian permohonan Badan Perwakilan Anggota (BPA) Bumiputera yang mengajukan uji materi UU 40/2014 tentang Perasuransian.

Salinan putusan yang berisi 139 halaman itu diantaranya menjelaskan kondisi aset Bumiputera sejak tahun 2013 hingga Juni 2020. Kondisi aset Bumiputera yang cenderung terus menurun pada lima tahun belakangan turut dibandingkan dengan kondisi aset industri asuransi komersial atau asuransi jiwa yang relatif terus meningkat.

Jika dirinci, total aset Bumiputera tercatat Rp 15 triliun pada 2015, pada 2016 senilai Rp 13,4 triliun, pada 2017 senilai Rp 11,9 triliun, pada 2018 senilai Rp 10,5 triliun, pada 2019 senilai Rp 10,2 triliun, dan sampai Juni tahun lalu Rp 10,1 triliun. Total aset itu tidak menyertakan cadangan premi yang ditangguhkan perusahaan sebesar Rp 12,34 triliun pada Juni 2020.

Sedangkan total aset industri asuransi komersial dari tahun 2015 sampai dengan Juni 2020 di antaranya, Rp 504,5 triliun, Rp 582,5 triliun, Rp 688,8 triliun, Rp 716,4 triliun, Rp 769,0 triliun, dan Rp 720,9 triliun. Dengan demikian, *asset share* dari Bumiputera atas industri asuransi komersial terus tergerus dari sebesar 3,0% pada 2015 menjadi 1,3% pada Juni 2020.

Selain dari sisi aset, penurunan juga terjadi pada jumlah peserta tertanggung. Penurunan itu dicatatkan sejak tahun 2017, baik dari segmen asuransi perorangan maupun asuransi kumpulan. Pada 2017, jumlah tertanggung asuransi perorangan sebanyak 2,92 juta dan sebanyak 2,01 juta peserta asuransi kumpulan. Maka total portofolio peserta tertanggung mencapai Rp 4,94 juta.

Berdasarkan catatan per Juni



Ana Mustamin

2020, jumlah pada masing-masing segmen menyusut signifikan. Portofolio asuransi perorangan terdapat 2,00 juta peserta. Sedangkan asuransi kumpulan menyusut lebih dalam, tinggal sekitar 847 ribu peserta. Dengan demikian, total peserta tertanggung Bumiputera menjadi 2,85 juta.

"Jumlah peserta yang menjadi tertanggung dalam polis AJB Bumiputera 1912, dapat kami sampaikan bahwa terdapat kecenderungan penurunan jumlah peserta yang menjadi tertanggung dalam polis AJB Bumiputera 1912 berdasarkan data dari periode tahun 2017 hingga Juni 2020," demikian ditulis dalam Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dikutip Minggu (17/1).

Sementara itu, MK memutuskan mengabulkan tiga poin yang pada intinya memerintahkan DPR dan Presiden menyelesaikan Undang-Undang (UU) tentang Asuransi Usaha Bersama paling lama dua tahun sejak putusan dikeluarkan pada Kamis (14/1). Putusan tersebut adalah perintah ke-2 setelah sebelumnya pada tahun 2013 MK juga memerintahkan hal yang sama melalui Putusan MK No. 32/PUU-XII/2013.

Mendesak

Ketentuan mengenai badan hukum usaha bersama (mutual) dinilai begitu mendesak bagi keberlangsungan Asuransi Jiwa

Bersama (AJB) Bumiputera. Kekosongan regulasi hampir 109 tahun telah membuat satu-satunya perusahaan asuransi mutual itu tidak memiliki pijakan hukum dan membuat tata kelola sengkarut.

Anggota Dewan Pakar BS Center sekaligus mantan Direktur SDM dan Umum AJB Bumiputera 1912 Ana Mustamin menyampaikan, sudah saatnya Bumiputera mendapatkan kepastian hukum dalam berusaha meski sudah sangat terlambat, dibanding tidak sama sekali. Karena selama satu abad lebih, manajemen Bumiputera mengelola perusahaan tanpa acuan konstitusional.

"Hal-hal teknis operasional membutuhkan acuan yang spesifik, bukan usaha bersama rasa PT. Pengaturan tentang hal-hal yang dianggap sebagai praktik tata kelola yang baik misalnya, semestinya memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan Perseroan Terbatas. Sengkarut yang terjadi di Bumiputera saat ini juga tidak lepas dari banyaknya intervensi pihak-pihak di luar perusahaan, dan gagasan-gagasan solusi yang lahir dari citarasa PT namun justru menyesatkan," kata Ana dalam keterangan resmi, Kamis (14/1).

Dia mengatakan, Bumiputera sebagai perusahaan mutual sejatinya merupakan perusahaan publik, maka peran pengawasan dan pengendalian oleh negara melalui pengaturan UU sangat penting. Bumiputera adalah perusahaan rakyat dengan skala besar, mengelola aset triliunan. "Adalah naif negara membiarkan perusahaan ini bermain tanpa aturan selama satu abad, lalu berharap semuanya akan baik-baik saja karena pengelola dan pengendalinya berhati 'malaikat' tanpa tendensi," imbu dia.

Implikasi Kekosongan Regulasi

Dalam hal ini, Ana turut memaparkan setidaknya lima implikasi kekosongan regulasi yang terjadi bagi Bumiputera. Karena Tanpa UU Usaha Bersama, tidak ada yang bisa merumuskan *best practice* Usaha Bersama di Indonesia. Adapun Ana sendiri lebih nyaman menyatakan UU Usaha Bersama ketimbang UU Asuransi Usaha Bersama lantaran DPR dan Presiden bisa lebih efektif dan efisien jika ketentuan mutual bisa diatur untuk keseluruhan industri.

Ana mengatakan, ketiadaan UU Usaha Bersama, melahirkan implikasi yang tidak sederhana

bagi pengelolaan Bumiputera. Pertama, dari aspek permodalan dan ukuran kesehatan. Perusahaan mutual adalah perusahaan berbasis perkumpulan orang, sebuah bentuk gotong royong, bukan perkumpulan modal. Bumiputera didirikan dengan modal nol rupiah.

Maka, menurut dia, jika ukuran kesehatan perusahaan asuransi menggunakan *risk based capital* (RBC), maka sejak awal saja Bumiputera sudah bermasalah. Sehingga setiap kali mengalami RBC minus, baik karena kesalahan pengelolaan maupun akibat krisis ekonomi makro, manajemen Bumiputera harus bermanuver agar ketentuan ukuran kesehatan bisa terpenuhi dalam waktu singkat. Manuver itu yang membuka peluang salah kelola.

Kedua, terkait pemegang saham pengendali. Ana menilai, seluruh pemegang polis adalah pemegang saham Bumiputera maka kondisi itu menyulitkan pengawasan dan pengendalian dari pemilik. Pada akhirnya, sulit untuk menunjuk pihak yang bertanggungjawab atas sengkarut pada Bumiputera.

Ketiga, peran BPA sebagai lembaga tertinggi. Tanpa UU Usaha Bersama, maka Anggaran Dasar (AD) menjadi peraturan tertinggi di Bumiputera. Otomatis, BPA yang menjadi representasi pemegang polis atau pemilik menjelma menjadi lembaga *super body*. Karena AD dirumuskan oleh BPA, dan bisa diamandemen kapan saja. Karena itu sidang BPA bisa menjadi sangat subjektif, tidak seperti RUPS yang diatur sangat ketat dalam UU PT.

Keempat, dari sisi manajemen perusahaan. Tafsir tentang praktik mutual kadang menjadi perdebatan internal sesama pengelola Bumiputera sendiri. Hal itu akan semakin runyam jika pengelola atau direktur yang masuk berasal dari luar yang sama sekali tidak memahami mutual, menggunakan kacamata PT, dan ahistoris terhadap perjalanan Bumiputera.

Kelima, implikasi terhadap pemegang polis. Bumiputera kesulitan mengeksekusi prinsip utama mutual yakni "*sharing the gain, sharing the pain*", sesuai isi AD. "Alih-alih pemegang polis mau ikut menanggung kerugian, mereka malah akan menuding Bumiputera melakukan tindakan sepihak. Tanpa UU Usaha Bersama, pemegang polis perusahaan Mutual tetap akan merasa sebagai pemegang polis PT," jelas Ana.

| KASUS BUMIPUTERA |

PEMBAYARAN KLAIM BERPOTENSI MAKIN MOLOR

Bisnis, JAKARTA — Pembayaran tunggakan klaim nasabah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 berpotensi makin molor akibat masalah hukum di tubuh organisasi.

Wibi Pangestu Pratama
redaksi@bisnis.com

Berdasarkan informasi yang dirangkum *Bisnis*, Peraturan Pemerintah No. 87/2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama terbit pada Januari 2020. Melalui aturan tersebut, Bumiputera memiliki landasan hukum untuk 'berhadapan' sepenuhnya dengan pemerintah, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pelaksana.

Di sisi lain, aturan itu melarang bagi pejabat pemerintahan dan politisi untuk menjadi peserta Rapat Umum Anggota (RUA). Badan Perwakilan Anggota (BPA) lantas mengajukan gugatan uji materiil Undang-Undang tentang Perasuransian ke Mahkamah Konstitusi pada April 2020 termasuk beleid baru itu.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyatakan dalam putusan kedua bahwa frasa itu harus diubah menjadi diatur dengan UU, sehingga bunyinya menjadi ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan UU. Oleh karena itu, UU khusus Bumiputera pun harus segera dibuat.

"Memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden untuk menyelesaikan UU tentang Asuransi Usaha Bersama dalam waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan," ujar Anwar dalam persidangan yang dikutip *Bisnis* pada Kamis (14/1).

Dalam pertimbangan hukumnya, para Hakim MK menilai bahwa berdasarkan praktik yang sudah berlangsung, perusahaan usaha

Sekarang pengurus korporasi harus fokus perhatian kepada jutaan pemegang polis yang juga pemilik perusahaan [karena merupakan asuransi mutual].

bersama tidak hanya berbentuk koperasi, melainkan juga perusahaan asuransi. Hal itu menjadi pengecualian Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Menurut MK, asuransi berbentuk usaha bersama (mutual) sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka tetapi belum ada aturan khusus terkaitnya. Pembentuk Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang 2/1992 tentang Usaha Perasuransian pun dinilai telah memberi penguatan terhadap asuransi mutual, sebelum aturan itu diubah pada 2014.

Pengamat asuransi Diding Surjida Anwar menilai bahwa menyikapi terbitnya putusan itu, manajemen Bumiputera harus memberikan kepastian nasib jutaan pemegang polis. Saat ini pemegang polis masih terjebak dalam pusaran gagal bayar klaim yang mencapai kisaran Rp12 triliun.

"Sekarang pengurus korporasi

harus fokus perhatian kepada jutaan pemegang polis yang juga pemilik perusahaan [karena merupakan asuransi mutual]," ujar Diding kepada *Bisnis*, Kamis (14/1).

Menurutnya, untuk bisa mengutamakan penyelesaian utang klaim, seluruh unsur manajemen Bumiputera harus terlebih dahulu menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan benar sesuai prinsip usaha bersama. Hal tersebut menjadi kunci agar kondisi keuangan dapat pulih.

Tata kelola perusahaan menjadi isu karena penyehatan keuangan Bumiputera belum kunjung menunjukkan hasil. Berdasarkan catatan *Bisnis*, Bumiputera mengalami defisit sejak 1997 dan kondisinya terus memburuk meskipun terdapat berbagai upaya perbaikan.

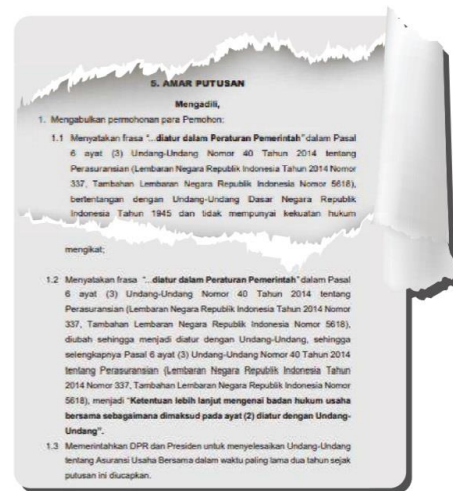
PARADOKS

Diding menilai bahwa keputusan MK itu membuat kedudukan Peraturan Pemerintah No.87/2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama menjadi tidak mengikat. Menurut dia, hal tersebut membuat dasar hukum perseroan kembali ke Anggaran Dasar Bumiputera tahun 2011.

Gugurnya PP No.87/2019 berimplikasi kepada kewajiban BPA dalam menyusun AD baru, sehingga Diding berpendapat bahwa AD 2011 tetap berlaku.

"PP 87/2019 menjadi tidak mengikat tetapi, asuransi mutual kan tetap harus tunduk pada UU 40/2014 tentang Perasuransian. Wasitnya tetap Otoritas Jasa Keuangan," katanya.

Adapun, ketika AD yang dibuat pada 2011 kembali menjadi



acuan, terdapat salah satu aspek vital yang belum terpenuhi. Diding menyebutnya sebagai kondisi kekosongan kekuasaan yakni kurangnya jumlah BPA, Dewan Komisaris, dan Direksi.

AD Bumiputera mensyaratkan jumlah BPA sebanyak 11 orang, tetapi saat ini jumlahnya kurang dari lima orang. Landasan hukum itu pun menyaratkan jumlah Dewan Komisaris definitif minimal tiga orang, tetapi kini tidak terdapat pejabat definitif meskipun jumlah komisaris tiga orang.

AD Bumiputera pun mensyarat-

kan jumlah direksi minimal tiga orang. Namun, perseroan hanya memiliki satu orang direksi definitif yakni Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum Dena Chairudin.

Kondisi di tubuh manajemen Bumiputera semakin pelik karena BPA melakukan perombakan besar di tubuh direksi. Nurhasanah selaku pimpinan memberikan tiga orang direksi dan mengangkat dua orang komisaris sebagai direksi, atau merangkap jabatan.

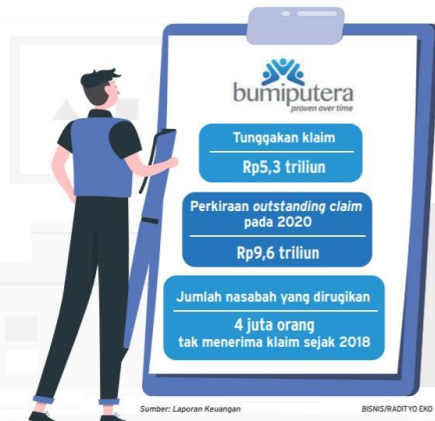
Hal tersebut tercantum dalam salinan surat Dewan Komisaris nomor 01/DK/1/2021 pada Selasa (5/1). Ketiga direksi efektif diberhentikan oleh BPA mulai 23 Desember 2020, sebagai hasil Sidang Luar Biasa (SLB) BPA pada hari yang sama.

Berdasarkan informasi yang diperoleh *Bisnis*, sidang itu pun memunculkan keputusan perpanjangan periode jabatan Nurhasanah dan Khoerul Huda sebagai anggota BPA hingga 2026. Selain itu, Ibnu Hajar diperpanjang masa jabatannya hingga 2024.

Menanggapi informasi yang diperoleh *Bisnis* itu, Diding menilai bahwa keputusan sidang SLB harus memperhatikan aturan yang masih berlaku kala itu. Menurut dia, amanat PP No.87/2019 masih berlaku saat sidang berlangsung, karena PP itu baru batal usai terbitnya putusan MK.

"Bila putusan MK mulai berlaku sejak ditetapkan, berarti PP 87/2019 berlaku sejak 26 Desember 2019 sampai dengan hari ini. Yang artinya BPA sudah habis masa jabatannya pada 26 Desember 2020 [sesuai ketentuan PP 87/2019]," katanya. ■

TANDA TANYA NASIB PEMBAYARAN KLAIM BUMIPUTERA



Nasabah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 harus mengulur kesabarannya. Alasannya, AJB Bumiputera 1912 memiliki permasalahan di tubuhnya sendiri yang bakal mengganggu proses pembayaran klaim nasabah.

Cuplikan Surat dari Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Rishwinandi pada 1 Oktober 2020

Dewan Komisaris wajib:

- membentuk Panitia Pemilihan Peserta RUA paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal Perintah Tertulis ini; dan
- memastikan Panitia Pemilihan Peserta RUA melaksanakan seluruh proses pemilihan Peserta RUA dan menetapkan 5 (lima) calon Peserta RUA dari setiap wilayah pemilihan untuk diajukan kepada Direksi paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak Panitia Pemilihan Peserta RUA dibentuk.

Kinerja Keuangan 2018-2019 (Rp miliar)

Indikator	2018	2019	Perubahan (%)
Aset	10.457,42	9.976,35	-4,60
Utang klaim	3.523,72	5.179,74	47,00
Ekuitas	-20.450,62	-20.441,50	-0,04
Pendapatan premi neto	3.350,96	2.993,51	-10,67
Laba bersih	-1.990,10	-48,98	-97,54

4. Prudential Gandeng SuperM Kampanyekan Hidup Sehat dan Bugar Beritasatu.com / 17-01-2021

Prudential Gandeng SuperM Kampanyekan Hidup Sehat dan Bugar

Minggu, 17 Januari 2021 | 17:17 WIB
Oleh : Happy Amanda Amalia / PYA



Grup K-pop SuperM. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com – Prudential Corporation Asia (Prudential) menggandeng grup pop Korea (K-pop) SuperM dalam peluncuran kampanye baru 'We DO Well Together', yang bertujuan mendorong masyarakat Asia untuk menjaga kesehatan dengan cara yang menyenangkan.

Melalui kampanye 'We DO Well Together' sepanjang 2021, Prudential dan SuperM akan mengadakan serangkaian acara untuk memotivasi masyarakat agar menjalani hidup yang lebih sehat dan bugar. Prudential akan mengumumkan lebih detail tentang kegiatan tersebut dan berbagai keseruan lainnya dalam beberapa waktu ke depan.

Chief Executive Official (CEO) Prudential Corporation Asia Nic Nicandrou mengatakan, Prudential dan SuperM memiliki visi yang sama. Oleh karena itu, Prudential ingin mengkampanyekan pentingnya untuk tetap bugar dan hidup sehat, terutama dalam keadaan saat ini.

"Bersama-sama, kami ingin memotivasi orang untuk meningkatkan gaya hidup sehat guna mencapai tujuan kesehatan masing-masing dengan cara yang positif, proaktif, dan menyenangkan," ujar Nic dalam siaran pers, Minggu (17/1).

Ditambahkan oleh Nic, bahwa Prudential bangga menjadi perusahaan asuransi jiwa regional pertama yang mengumumkan kemitraan dengan grup K-pop SuperM yang fenomenal ini. Dibentuk pada 2019 oleh SM Entertainment dan Capitol Music Group, SuperM menyatukan tujuh anggota dari grup K-pop papan atas yang dicintai oleh jutaan penggemar di seluruh dunia.

"Pendekatan mereka yang positif dan energik terhadap musik mencerminkan semangat 'We DO' dari Prudential yang merayakan semangat optimisme generasi saat ini," tambahnya.

Sebagai perusahaan asuransi terkemuka yang fokus untuk membantu masyarakat mendapatkan yang terbaik dalam hidup, Prudential telah membantu jutaan nasabah di Asia dengan memberikan perlindungan kesehatan dan juga finansial mereka dapat mencapai tujuan hidupnya.

"Lebih dari sekadar memberikan perlindungan, Prudential juga menghadirkan layanan kesehatan yang holistik, membantu masyarakat untuk mencegah dan menunda timbulnya penyakit. Hal ini dimungkinkan berkat aplikasi kesehatan *mobile all-in-one* kami Pulse by Prudential serta rangkaian lengkap solusi dan layanan terbaik di kelasnya untuk membantu orang hidup lebih sehat dan berumur panjang. Kampanye terbaru yang berfokus pada kesehatan dan kebugaran ini mencerminkan komitmen berkelanjutan kami untuk menempatkan pelanggan sebagai pusat dari bisnis kami," demikian penjelasan Nic.

Sedangkan SuperM menuturkan, saat dunia mengalami tantangan karena pandemi, mereka mengaku berambisi untuk menyebarkan energi positif dan membantu sebanyak mungkin orang guna mencapai tidak hanya kesehatan fisik yang baik, tetapi juga kesehatan mental.

"Kami berbagi misi yang sama dengan Prudential untuk membantu meningkatkan kesehatan masyarakat dan mendorong optimisme dalam berbagai keadaan, baik maupun buruk. Melalui 'We DO Well Together', kami mengajak semua orang untuk menggunakan energi dan semangat yang sama dengan 'We DO' untuk mencapai tujuan hidup," ujarnya.

5. Restrukturisasi Jiwasraya Jadi Opsi Terbaik Bagi Nasabah [Bisnis.com](#) / 15-01-2021

Restrukturisasi Jiwasraya Jadi Opsi Terbaik Bagi Nasabah

Dengan mengalihkannya ke IFG, polis nasabah Jiwasraya berpeluang mendapatkan pengembalian investasi yang lebih baik.



Media Digital - Bisnis.com
15 Januari 2021 | 09:31 WIB



Warga melintas di dekat logo Asuransi Jiwasraya di Jakarta. *Bisnis - Abdurahman*

A+

Bisnis.com, JAKARTA – Program restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dinilai sebagai solusi terbaik bagi nasabah, karena memberikan peluang pengembalian polis yang lebih baik dibandingkan dengan pilihan lainnya.

Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan bahwa restrukturisasi menjadi pilihan terbaik dibandingkan dengan opsi lainnya. Apalagi pemerintah telah memulainya dengan mendirikan Indonesia Financial Group (IFG) dengan suntikan dana sekitar Rp20 triliun.

"Dengan dukungan sinergi BUMN, maka potensi *market* perusahaan baru ini sangat besar. Dengan pilihan pengelola yang profesional dan mengedepankan prinsip GCG diharapkan *sustainability* perusahaan akan lebih terjaga," ujarnya kepada *Bisnis* baru-baru ini.

Seperti diketahui, IFG merupakan perusahaan baru yang dibentuk pemerintah di bawah PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebagai *Holding* BUMN Perasuransian dan Penjaminan. Setelah restrukturisasi, nasabah Jiwasraya akan diarahkan kepada IFG.

Dengan mengalihkannya ke IFG, nasabah Jiwasraya berpeluang mendapatkan pengembalian investasi yang lebih baik. Sebaliknya, berperkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akan membuka peluang untuk mendapatkan pengembalian yang lebih terbatas dengan jangka waktu belum bisa diukur.

Toto menuturkan, pemegang polis yang tidak setuju dengan restrukturisasi atau berpindah ke IFG diprediksi akan mendapatkan pengembalian investasi yang lebih terbatas. Pasalnya, sumber pengembalian investasi hanya bersumber dari aset Jiwasraya yang tersedia dan jumlahnya tidak besar.

Menurutnya, pilihan berbagi beban atau *sharing pain* antara nasabah dan pemerintah merupakan opsi yang dapat dikerjakan. Pemegang polis Jiwasraya juga diminta kerelaannya untuk penyelesaian investasi dengan skema restrukturisasi, sedangkan IFG menyelesaikan kewajiban kepada para pemegang polis Jiwasraya.

"Di sisi lain, pemegang polis Jiwasraya diminta kerelaan untuk penyelesaian investasi asuransinya dengan skema restrukturisasi [*haircut* dan perpanjangan tenor] yang memungkinkan IFG Life untuk menyelesaikan kewajiban ke pemegang polis *ex* Jiwasraya," tambahnya.

Secara terpisah, Pengamat asuransi dan pengajar Sekolah Tinggi Asuransi Trisakti Azuarini Diah mengingatkan bahwa jangan sampai kasus pada sektor asuransi terjadi lagi pada tahun ini. Perusahaan asuransi juga memiliki tanggung jawab menjaga citra industry.

"Perihal gagal bayar, maka ke depan perusahaan harus terus berpedoman terhadap aturan dan sisi investasi yang dikelola secara benar dan hati-hati. Ingat, perusahaan asuransi tak akan *default* meskipun klaimnya jatuh tempo. Selain itu, produk PAYDI harus memberikan proyeksi imbal hasil yang masuk akal kepada nasabah," ujarnya.

Azuarini menyebutkan, data terakhir dari pelaku industri asuransi jiwa dan umum masih mengalami pertumbuhan negatif pada sisi kinerja aset.

"Kalau asuransi *general*, terdampak di asuransi properti dan kendaraan bermotor, sedangkan kalau asuransi jiwa berdampak di produk-produk yang penjualannya dilakukan secara tatap muka," jelasnya.

Untuk itu, Azuarini menekankan industri asuransi umum maupun jiwa pada 2021 harus berbenah, memperkuat pasar yang sudah ada, dan pembangunan segmen ritel.

"Produk harus difokuskan kepada kebutuhan pasar dan mempunyai *sustainable income* bagi perusahaan. Lakukan juga penjualan secara *online* dan digitalisasi, tidak di penjualannya saja tapi harus sampai servis hingga pelayanan klaim," ucapnya.

6. Murah dan Cepat, BRI Life Tawarkan Asuransi Perlindungan Jiwa AJAIB
[Infobanknews.com](https://infobanknews.com) / 15-01-2021

infobanknews.com

Beyond Banking & Money Business

PERBANKAN

MONETER DAN FISKAL

KEUANGAN

PASAR MODAL

COVID-19 UPDATE

EKONOMI DAN BISNIS

MARKET UPDATE

SHARIAH INSIGHT

SNAPSHOT

LIFESTYLE

INFO BPR

INFO ANDA

OTOMOTIF

ENGLISH SECTION

Murah dan Cepat, BRI Life Tawarkan Asuransi Perlindungan Jiwa AJAIB

By [Rezki Nisaputra](#) on 15/01/2021 · No Comment

f

twitter

g+

in

print

email

Jakarta – Perlindungan jiwa dari kejadian yang tak diinginkan tentu dibutuhkan oleh setiap orang kapan saja dan dimana saja. Untuk memenuhi kebutuhan ini, BRI Life memiliki produk Asuransi Mikro AJAIB yang akan memberikan perlindungan pasti dalam seketika.

Produk Asuransi ini akan memberikan perlindungan jiwa dan kecelakaan diri bagi siapapun dengan usia minimal 1 bulan hingga 64 tahun dengan premi yang sangat terjangkau, mulai dari Rp10 ribu. Dengan premi yang terjangkau, nasabah akan dapat mendapat manfaat sampai dengan maksimal Rp50 juta. Kemudian, Asuransi Ajaib dari BRI Life juga akan melindungi anda dari, kejadian berikut.

1. Meninggal dunia karena kecelakaan
2. Meninggal dunia bukan karena kecelakaan
3. Penggantian biaya perawatan/pengobatan di rumah sakit karena kecelakaan

Proses klaim asuransinya pun terbilang cukup mudah. Nasabah hanya perlu mengunduh formulir klaim asuransi yang tersedia di website brilife.co.id dan memenuhi dokumen persyaratan lainnya seperti, bukti kepesertaan, KTP, Kartu Keluarga, dan lainnya. Untuk selengkapnya, persyaratan klaim asuransi tersedia di brosur Asuransi Mikro AJAIB.

Nasabah juga tidak perlu khawatir soal reputasi dan kualitas Asuransi AJAIB dari BRI Life.

Tahun lalu, BRI Life berhasil memborong 3 penghargaan di acara Top 20 Financial Institutions Award 2020 dari Infobank. Penghargaan tersebut yakni "The Best Performing Life Insurance 2020" untuk kategori perusahaan asuransi jiwa berpremi bruto Rp5 triliun ke atas, dan best company kategori life insurance. BRI Life juga berhasil menerima penghargaan "Best of the best CFO Financial Institutions 2020"

Selain itu, BRI Life juga berhasil menerima penghargaan tersebut karena berhasil mencatat kinerja positif selama tiga tahun terakhir sejak 2017. Oleh karena itu, nasabah tidak perlu khawatir akan kualitas produk asuransi AJAIB. Lalu, tunggu apa lagi? segera dapatkan Asuransi Mikro AJAIB dengan segudang manfaat dan premi yang terjangkau dari BRI Life. (*) Evan Yulian Philaret

Asuransi Perlindungan AJAIB, BRI Life

Murah dan Cepat, BRI Life Tawarkan Asuransi Perlindungan Jiwa AJAIB added by Rezki Nisaputra on 15/01/2021

[View all posts by Rezki Nisaputra](#) →

7. Prudential Gandeng SuperM Kampanyekan Hidup Sehat dan Bugar [Investor.id](#) / 17-01-2021



Grup K-pop SuperM. (Foto: Istimedia)

Prudential Gandeng SuperM Kampanyekan Hidup Sehat dan Bugar

Minggu, 17 Januari 2021 | 17:13 WIB
Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Prudential Corporation Asia (Prudential) menggandeng grup pop Korea (K-pop) SuperM dalam peluncuran kampanye baru 'We DO Well Together', yang bertujuan mendorong masyarakat Asia untuk menjaga kesehatan dengan cara yang menyenangkan.

Melalui kampanye 'We DO Well Together' sepanjang 2021, Prudential dan SuperM akan mengadakan serangkaian acara untuk memotivasi masyarakat agar menjalani hidup yang lebih sehat dan bugar. Prudential akan mengumumkan lebih detail tentang kegiatan tersebut dan berbagai keseruan lainnya dalam beberapa waktu ke depan.

Chief Executive Official (CEO) Prudential Corporation Asia Nic Nicandrou mengatakan, Prudential dan SuperM memiliki visi yang sama. Oleh karena itu, Prudential ingin mengkampanyekan pentingnya untuk tetap bugar dan hidup sehat, terutama dalam keadaan saat ini.

"Bersama-sama, kami ingin memotivasi orang untuk meningkatkan gaya hidup sehat guna mencapai tujuan kesehatan masing-masing dengan cara yang positif, proaktif, dan menyenangkan," ujar Nic dalam siaran pers, Minggu (17/1).

Ditambahkan oleh Nic, bahwa Prudential bangga menjadi perusahaan asuransi jiwa regional pertama yang mengumumkan kemitraan dengan grup K-pop SuperM yang fenomenal ini. Dibentuk pada 2019 oleh SM Entertainment dan Capitol Music Group, SuperM menyatukan tujuh anggota dari grup K-pop papan atas yang dicintai oleh jutaan penggemar di seluruh dunia.

"Pendekatan mereka yang positif dan energik terhadap musik mencerminkan semangat 'We DO' dari Prudential yang merayakan semangat optimisme generasi saat ini," tambahnya.

Sebagai perusahaan asuransi terkemuka yang fokus untuk membantu masyarakat mendapatkan yang terbaik dalam hidup, Prudential telah membantu jutaan nasabah di Asia dengan memberikan perlindungan kesehatan dan juga finansial mereka dapat mencapai tujuan hidupnya.

"Lebih dari sekadar memberikan perlindungan, Prudential juga menghadirkan layanan kesehatan yang holistik, membantu masyarakat untuk mencegah dan menunda timbulnya penyakit. Hal ini dimungkinkan berkat aplikasi kesehatan *mobile all-in-one* kami Pulse by Prudential serta rangkaian lengkap solusi dan layanan terbaik di kelasnya untuk membantu orang hidup lebih sehat dan berumur panjang. Kampanye terbaru yang berfokus pada kesehatan dan kebugaran ini mencerminkan komitmen berkelanjutan kami untuk menempatkan pelanggan sebagai pusat dari bisnis kami," demikian penjelasan Nic.

Sedangkan SuperM menuturkan, saat dunia mengalami tantangan karena pandemi, mereka mengaku berambisi untuk menyebarkan energi positif dan membantu sebanyak mungkin orang guna mencapai tidak hanya kesehatan fisik yang baik, tetapi juga kesehatan mental.

"Kami berbagi misi yang sama dengan Prudential untuk membantu meningkatkan kesehatan masyarakat dan mendorong optimisme dalam berbagai keadaan, baik maupun buruk. Melalui 'We DO Well Together', kami mengajak semua orang untuk menggunakan energi dan semangat yang sama dengan 'We DO' untuk mencapai tujuan hidup," ujarnya.

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

8. Kelola Dana Rp 270,5 Triliun, BNI Jadi Kustodian Aset Taspen
[Republika.co.id](https://republika.co.id) / 17-01-2021

Home > Ekonomi > Ekonomi

Kelola Dana Rp 270,5 Triliun, BNI Jadi Kustodian Aset Taspen

Ahad 17 Jan 2021 16:36 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Gita Amanda



Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto (kiri) dan Direktur Keuangan Taspen Patar Sitanggang (kanan) menandatangani Perjanjian Kerjasama Kustodian di Jakarta, (15 Januari 2021). BNI mendapatkan kepercayaan menjadi pemberi jasa kustodian untuk mengelola aset-aset Taspen. Asset Under Custody (AUC) BNI per bulan Desember 2020 mencapai Rp 270,5 triliun dengan total nasabah mencapai lebih dari 200 institusi.

Foto: istimewa

BNI dan Taspen telah bekerja sama terkait pembayaran uang pensiun yang masih berjalan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menjadi pemberi jasa kustodian untuk mengelola aset-aset PT Taspen (Persero). Saat ini **BNI** sudah mengelola *Asset Under Custody* (AUC) sebesar Rp 270,5 triliun per Desember 2020.

Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto mengatakan, kerja sama ini akan memperkuat sinergi kedua BUMN tersebut, sehingga dapat memberikan nilai lebih bagi kedua perusahaan pelat merah ini. Sebelumnya, BNI dan Taspen telah bekerja sama terkait pembayaran uang pensiun yang masih berjalan saat ini.

"*Asset Under Custody* (AUC) BNI per Desember 2020 mencapai Rp 270,5 triliun dengan total nasabah mencapai lebih dari 200 institusi," ujarnya dalam keterangan resmi, Ahad (17/1).

Jika dibandingkan dengan akhir 2019 lalu, AUC BNI Custody tumbuh sembilan persen dari AUC 2019 sebesar Rp 247 triliun, dengan penambahan nasabah baru pada 2020 sebanyak 35 nasabah baru. "Hal tersebut merupakan kepercayaan sekaligus prestasi bagi BNI. Kami masih dipercaya untuk melayani transaksi kustodian baik oleh nasabah *existing* maupun nasabah baru. BNI mendapatkan kepercayaan dari Taspen untuk melayani kebutuhan transaksi kustodian," ucapnya.

Menurutnya BNI berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik bagi Taspen dan berharap kerja sama ini dapat meningkatkan bisnis kedua belah pihak. BNI juga bekerja sama dengan **Taspen Life** terkait penyediaan produk asuransi jiwa kredit dan penyediaan layanan jasa perbankan.

PT Asuransi Jiwa Taspen atau Taspen Life merupakan perusahaan anak Taspen yang bergerak pada bidang asuransi jiwa. Adanya kerja sama ini diharapkan dapat terjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak khususnya pemberian pertanggungan asuransi bagi debitur kredit konsumen BNI.

"Semoga kerja sama ini dapat mencerminkan perilaku Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif di antara sesama perusahaan BUMN yang memiliki *core values* yang sama, yakni AKHLAK," ucapnya.

OJK Masih Tunggu Kementerian BUMN Soal Operasional IFG Life

Reporter: **Francisca Christy Rosana**

Editor: **Rr. Ariyani Yakti Widyastuti**

Jumat, 15 Januari 2021 16:45 WIB

KOMENTAR



Logo OJK. wikipedia.org

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK masih menunggu Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN soal perkembangan operasional Indonesia Financial Group Life atau [IFG Life](#). IFG Life merupakan perusahaan wadah restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"IFG Life saya belum dapat informasi dari Kementerian BUMN. Pada waktunya BUMN-lah yang akan umumkan," ujar Deputy Komisioner Humas dan Logistik [OJK](#) Anto Prabowo di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Januari 2021.

Operasional IFG Life masih menunggu terbitnya izin dari OJK untuk bisa menjalankan bisnis asuransi jiwa. Proses pengajuan telah berjalan dan manajemen IFG Life sudah melengkapi persyaratan kepada otoritas.

IFG Life sebagai penampung nasabah Jiwasraya telah menyiapkan empat produk asuransi baru yang siap ditawarkan kepada calon pemegang polis. Produk pertama ialah JS Tata Masa Depan atau JS TAMPAN. Produk ini dikhususkan bagi pemegang polis perorangan atau retail dengan pembayaran premi berkala.

Selanjutnya, produk kedua ialah Manfaat Bertahap atau JS Mantap yang ditawarkan bagi pemegang polis retail pembayaran premi sekaligus. Ketiga, IFG Life menyiapkan produk polis Manfaat Bertahap Plus atau JS Mantap Plus.

10. [Foto] Premi Industri Asuransi Terkoreksi
Bisnis Indonesia, hal. 15 / 18-01-2021 hal. 15

PREMI INDUSTRI ASURANSI TERKOREKSI



Bisnis/Abdurachman

Karyawati berjalan di dekat deretan logo-logo asuransi di Jakarta, belum lama ini. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso menyatakan bahwa pada 2020 premi asuransi komer-

sial mengalami kontraksi cukup besar akibat pandemi Covid-19. Capaian tersebut berbanding terbalik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang masih mencatatkan kinerja positif.

Home > Ekonomi > Ekonomi

Sepanjang 2020, Premi Asuransi Terkoreksi 7,34 Persen

Ahad 17 Jan 2021 16:32 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Nidia Zuraya



Asuransi (Ilustrasi)

Foto: wepridefest.com

Premi industri asuransi mengalami koreksi cukup besar seiring tekanan akibat pandemi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan premi asuransi komersial minus 7,34 persen (*year on year/yoy*), berbanding terbalik dari 2019 yang mampu tumbuh 4,77 persen (*yoy*). Hal ini imbas dari tekanan selama pandemi covid-19.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan premi industri asuransi mengalami koreksi cukup besar seiring tekanan akibat pandemi Covid-19. Peningkatan kapasitas industri pun menjadi fokus besar untuk membantu pemulihan ekonomi.

"Untuk industri keuangan non bank cukup dalam terkonstruksi untuk premi asuransi terkontraksi minus 7,34 persen karena aktivitas ekonomi berdampak pada asuransi kita" ujarnya akhir pekan ini.

Piutang perusahaan pembiayaan juga tercatat minus 17,1 persen (*yoy*). Padahal pada tahun sebelumnya piutang mampu tumbuh 3,7 persen. Menurut Wimboh, hal ini dipicu oleh belum pulihnya perekonomian berbagai sektor.

OJK: Premi Industri Asuransi Turun 7,34 Persen pada 2020

Reporter: [Bisnis.com](https://bisnis.com)

Editor: [Ali Akhmad Noor Hidayat](#)

Minggu, 17 Januari 2021 03:16 WIB

KOMENTAR



Logo OJK. wikipedia.org

TEMPO.CO, Jakarta - Premi industri [asuransi](#) mengalami koreksi cukup besar seiring tekanan akibat pandemi Covid-19. Peningkatan kapasitas industri pun menjadi fokus besar untuk membantu pemulihan ekonomi.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menjabarkan bahwa pada 2020 premi asuransi komersial mengalami kontraksi cukup besar. Capaiannya berbanding terbalik jika dibandingkan dengan tahun lalu yang masih mencatatkan kinerja positif.

"Premi asuransi komersial mencapai Rp 242,46 triliun atau terkontraksi sebesar -7,34 persen year-on-year [yoy]," ujar Wimboh dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan, Jumat 15 Januari 2021.

Pada 2019, total premi asuransi komersial tercatat mencapai Rp261,66 triliun. Jumlah itu tumbuh 4,77 persen secara tahunan jika dibandingkan dengan kinerja 2018, sayangnya melambat pada 2020.

Bukan hanya asuransi, Wimboh pun menjelaskan bahwa kinerja intermediasi industri keuangan non bank (IKNB) cukup tertekan pada tahun lalu. Kondisi itu tak lepas dari dampak pandemi Covid-19.